

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung bersikap netral terhadap ajakan untuk bergabung dengan BRICS. Keputusan Indonesia untuk menolak tawaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor internasional, domestik, serta ekonomi-militer. Dengan menolak bergabung dengan BRICS, Indonesia tampak mengedepankan agenda politik internasional untuk mencapai kepentingan tertentu, mengingat langkah ini dapat memicu ketegangan dengan negara-negara Non-Blok. Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Indonesia untuk tidak bergabung dengan BRICS pada tahun 2023. Faktor-faktor tersebut akan dianalisis menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri oleh William D. Coplin, dengan mempertimbangkan indikator-indikator seperti konteks internasional, politik domestik, pengambil keputusan, serta kapabilitas ekonomi dan militer.

Alasan Indonesia menolak bergabung dengan BRICS pada tahun 2023 dapat dipahami melalui berbagai faktor dalam konteks internasional. Pertama, terdapat dinamika ekonomi politik internasional antara negara-negara BRICS dan Amerika Serikat. Selain itu, konflik yang sering terjadi antara anggota BRICS seperti Tiongkok dan India dapat memengaruhi stabilitas aliansi tersebut. Di samping itu, terbentuknya aliansi BRICS juga berisiko menyebabkan dedolarisasi dalam konteks ekonomi global.

1. Rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat

Setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi kekuatan dominan dalam politik dan ekonomi global selama beberapa

dekade. Namun, sejak dekade 1970-an, konsolidasi dan perkembangan internal Republik Rakyat Tiongkok (RRC) secara perlahan mulai meruntuhkan anggapan bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya kekuatan super. Belakangan ini, Tiongkok telah mulai menggeser Amerika Serikat sebagai pusat utama ekonomi dunia, terutama seiring dengan ketidakstabilan politik yang melanda Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan antara kedua negara seringkali muncul secara terbuka, ditandai oleh gesekan diplomatik dan persaingan hegemoni di wilayah-wilayah konflik, yang berdampak signifikan pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

2. Konflik antara Tiongkok dan India

India dan Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia dan memulai hubungan bilateral pada tahun 1950. Namun, hubungan kedua negara mulai memburuk pada awal 1959 karena perselisihan batas wilayah. Perbedaan pandangan mengenai batas wilayah ini menyebabkan terjadinya perang Sino-Indian pada tahun 1962, yang berfokus pada perebutan wilayah Aksai Chin dan Garis McMahon di Arunachal Pradesh. India mengklaim Aksai Chin, yang saat ini dikuasai oleh Tiongkok, sebagai wilayahnya, dan perselisihan ini melibatkan Tiongkok, Pakistan, dan India. Selain itu, konflik juga muncul terkait perebutan wilayah Kashmir, khususnya Jammu dan Kashmir. Meskipun kedua negara sempat memperbaiki hubungan bilateral dan menjalin kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan militer, ketegangan kembali meningkat pada tahun 2017 akibat sengketa wilayah di dataran tinggi Doklam. Konflik tersebut ditandai dengan media lokal dan tindakan pelemparan batu antara Tiongkok dan India. Sejak berdirinya BRICS, rivalitas yang berkepanjangan antara India dan Tiongkok memberikan dampak negatif pada

aliansi tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas dan efektivitas kerja sama dalam kelompok ini.

3. MIKTA Sebagai *Bridge Builder*

Pada 2 Maret 2023, Indonesia mengambil alih kepemimpinan MIKTA dari Turki, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua MIKTA pada tahun 2022. Selama masa kepemimpinan Indonesia di MIKTA pada tahun 2023, fokus utama adalah pada pengembangan forum ini. Sebagai forum negara-negara kekuatan menengah, MIKTA berperan sebagai pembuat konsensus dan jembatan penghubung (*Bridge Builder*) antara negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara anggota MIKTA juga merupakan bagian dari G20 dan menyumbang sekitar 10% dari perdagangan internasional. Dengan tantangan yang dihadapi multilateralisme saat ini, MIKTA diharapkan dapat menjadi organisasi terdepan dalam mempertahankan multilateralisme, serta mendorong keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bersama.

Pada tahun 2011, Indonesia terpilih sebagai calon anggota BRICS. Jika kelompok ini gagal mencapai tujuannya, kelompok ini mencakup Brasil, Rusia, India, Thailand, dan Afrika Selatan. Namun, Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan dalam siaran persnya bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat memperoleh manfaat dari kenaikan upah minimum karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kepresidenan Jokowi khawatir pemerintah akan lebih fokus pada konsultasi ASEAN dan kerja sama ekonomi BRICS daripada kerja sama ekonomi BRICS. Selain itu, hal ini mengungkapkan fakta penting: mayoritas masyarakat Indonesia masih menganut tradisi non-blok. Selain itu, Indonesia, sebuah blok yang telah ada sejak Perang Dingin dan digunakan untuk membangun dominasi Amerika di Barat, telah kehilangan perhatian atas strategi agresif Tiongkok untuk memperkuat BRICS.

Dari sudut pandang pengambilan keputusan, penolakan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS pada tahun 2023 dapat dipahami. Indonesia kurang tertarik untuk bergabung

dengan BRICS karena dianggap masih memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan kelompok negara maju lainnya, padahal BRICS mempunyai posisi yang signifikan di dunia internasional. Selain itu, keputusan Indonesia untuk tidak bergabung dengan BRICS didasari oleh kurangnya minat untuk segera bergabung. Indonesia mampu mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan seluruh negara anggota BRICS karena telah memiliki kerja sama bilateral dengan mereka. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan masing-masing negara BRICS yang menjadi mitra strategis.

Ketika Indonesia mengambil alih jabatan Ketua MIKTA pada tahun 2023, pihaknya bermaksud untuk memberikan penekanan lebih besar pada program-program yang akan dilaksanakan di MIKTA selama masa jabatannya. Akronim MIKTA adalah singkatan dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, yang semuanya merupakan anggota. Sebagai platform informal untuk konsultasi dan koordinasi, kelompok ini didirikan pada tahun 2013 di antara negara-negara dengan perekonomian menengah yang dinamis dan berpengaruh dalam tatanan global. Melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif, MIKTA bertujuan untuk memperkuat kerja sama multilateral, mendorong stabilitas dan kemakmuran global, serta mengatasi tantangan internasional. Indonesia dapat meningkatkan peran dan pengaruhnya di forum internasional dengan bergabung di MIKTA. Oleh karena itu, Indonesia dapat berpartisipasi dalam diskusi mengenai isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan keamanan serta lebih aktif menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Indonesia berpotensi menciptakan peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan bekerja sama dalam MIKTA. Perdagangan, investasi, dan kolaborasi di bidang teknologi dan inovasi dapat memperoleh manfaat dari hubungan yang lebih erat dengan negara-negara anggota MIKTA.



5.2 Saran

BRICS merupakan salah satu organisasi yang dinilai sangat bermanfaat bagi Indonesia. Pada tahun 2023 dan pada masa akhir kepemimpinan presiden Jokowi dodo opsi bergabung dengan BRICS ini belum menjadi urgensi dari kepentingan negara. Ada baiknya pada masa jabatan presiden selanjutnya lebih mempertimbangkan untuk bergabung dengan BRICS ini.

